

PROGRAM WADUL BAE (WARGA PEDULI BOCAH LAN EMBOKE) SEBAGAI UPAYA MENEKAN TINGKAT KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA CIREBON

Wardah Nuroniyah,

Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta email: wardah.faza17@gmail.com

Diterima: Januari, 2022

Direvisi :Maret, 2022

Diterbitkan: Juni, 2022

Abstrak; Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun tidak memandang tua maupun muda. Tentunya isu kekerasan seksual sudah tidak asing lagi dalam deretan kasus kejahatan, khususnya di Indonesia. Kejahatan seksual yang mendominasi di Indonesia adalah kekerasan seksual pada anak, yang semakin marak terjadi setiap tahunnya. Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki tingkat kasus kekerasan seksual pada anak cukup tinggi dan memprihatinkan. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa masih banyak diskriminasi yang dialami oleh anak di negeri ini. Kota Cirebon dengan mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak, hal tersebut sebagai salah satu bukti nyata keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang di bantu oleh elemen-elemen terkait, salah satu elemen yang mempunyai peranan besar adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan (P2TP2A) Kota Cirebon dalam programnya yaitu Kader Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Mboke). Program yang telah di rintis sejak tahun 2005 hingga saat ini merupakan layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terintegrasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon, program Wadul Bae merupakan layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program Wadul Bae juga adalah suatu wadah kepedulian warga akan hak-hak anak yang ada di wilayahnya. Tujuan dari program Wadul Bae ini antara lain untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan di tingkat RT RW dan Kelurahan di Kota Cirebon, membantu menyelesaikan masalah, dan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cirebon.

Penelitian ini berupaya untuk berfokus kepada kepada strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam program “Wadul Bae” dalam menekan tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kota Cirebon. Adapun pertanyaan penelitian, sebagai berikut; 1). Apa sajakah Program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah lan Emboke) ? 2). Bagaimana strategi program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan emboke) dalam menekan tingkat kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon?. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk; 1). Mengetahui Program apa saja yang diselenggarakan oleh Wadul Bae. (2). Memperoleh gambaran mengenai strategi program Wadul Bae dalam menekan tingkat kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon. Adapun hasil penelitian adalah strategi Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menekan tingkat kekerasan seksual melalui Program Wadul Bae, dibagi ke beberapa klasifikasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang akan di paparkan sebagai berikut; 1).Melaksanakan Riset Selama Dua Tahun Untuk Perencanaan Program Wadul Bae, 2).Mengelompokan Khalayak Sasaran Untuk Promosi Program Wadul Bae. 3).Membuat Tim Kader Wadul Bae. 4).Mengimplementasikan Strategi Sosialisasi. 5). Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Wadul Bae. 6).Kegiatan Evaluasi Pada Program Wadul Bae. Dalam membuat strategi pemasaran sosial Wadul Bae menggandeng beberapa masyarakat di tiap tiap RT dan RW di Kota Cirebon, juga pihak PPT RSUD Gunung Jati, Polresta Cirebon, Sekolah, Puskesmas, dan beberapa lembaga seperti Rumah Zakat, Zakat Center, dan Baznas Kota Cirebon dan juga Media untuk bekerja sama dalam mengurangi permasalahan kekerasan baik pada perempuan dan anak di Kota Cirebon.

Kata Kunci: Kota Layak Anak, Kekerasan, Wadul Bae

Pendahuluan

Secara Sosiologi anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas (Subiyakto, 2012). Disamping itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. Hal ini telah tertuang dalam UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Setiap anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak. Meski telah banyak peraturan yang mengatur dan mengawasi anak dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, masih saja ditemukan permasalahan anak yang justru semakin kompleks. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memproteksi masa depan anak (Ekardo, Firdaus, & Elfemi, 2014). Namun, permasalahan anak mencerminkan adanya penyalahgunaan, eksploitasi, diskriminasi dan masih banyak anak yang mengalami tindak kekerasan yang dapat membahayakan perkembangan jasmani, rohani serta sosialnya (Wismayanti, 2012). Di bidang pendidikan, angka putus sekolah mengalami trend kenaikan dengan alasan berbagai faktor (misalnya: kemiskinan), di bidang kesehatan ditemukan masih banyaknya anak dari keluarga miskin yang belum dapat mengakses kesejahteraan, aksesibilitas anak disable dalam memperoleh pendidikan, serta maraknya kasus kekerasan pada anak yang disebabkan oleh orang-orang terdekat di sekitarnya seperti: orang tua, saudara, hingga guru dan teman sebaya. Bahkan, aturan perlindungan sosial dan hukum masih menyisakan beragam kasus yang melibatkan anak dengan tingginya kasus anak yang bekerja di bawah umur, anak yang bermasalah dengan hukum serta kasus kekerasan seksual adalah kejahatan yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang, terutama kesehatan psikologis dan mental seseorang.

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun tidak memandang tua maupun muda. Tentunya isu kekerasan seksual sudah tidak asing lagi dalam deretan kasus kejahatan, khususnya di Indonesia. Kejahatan seksual yang mendominasi di Indonesia adalah kekerasan seksual pada anak, yang semakin marak terjadi setiap tahunnya. Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki tingkat kasus kekerasan seksual pada anak cukup tinggi dan memprihatinkan. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa masih banyak diskriminasi yang dialami oleh anak di negeri ini. Menurut data dari Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa barat, pada *jabar.metrotvnews.com* dan *radarCirebon.com* menyatakan bahwa kasus kekerasan pada anak di Jawa Barat semakin lama kian memprihatinkan. Palsanya, dalam kurun waktu enam tahun terakhir, kasus kekerasan pada anak di Jawa Barat terus meningkat. Berdasarkan data yang dicatat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, terdapat 1.249 kasus terjadi dari 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Barat menjadi kasus yang dominan dan banyak memakan korban. P2TP2A Jawa Barat menerima laporan kasus dari tahun 2019-2021 sebanyak 346 kasus kekerasan seksual pada anak di Jawa Barat.

Dalam perkembangannya prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) adalah mendapatkan penghargaan nasional sebagai Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2017. Penghargaan Kota Layak Anak tersebut hanya diberikan kepada 23 Provinsi, 126 Kota/Kabupaten di Indonesia, Kota Cirebon salah satunya yang mendapatkan penilaian sebesar 750 poin. Kemudian pada tahun 2018 penghargaan Kota Layak Anak Cirebon naik peringkatnya menjadi Madya. Kemudian pada 2019 Cirebon berhasil mempertahankan predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya setelah tahun sebelumnya prestasi tersebut diraih, prestasi Madya terus dipertahankan kota Cirebon hingga tahun 2021.

Dengan mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak, hal tersebut sebagai salah satu bukti nyata keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang di bantu oleh elemen-elemen terkait, salah satu elemen yang mempunyai peranan besar adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan (P2TP2A) Kota Cirebon dalam programnya yaitu Kader Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Mboke). Program yang telah di rintis sejak tahun 2005 hingga saat ini merupakan layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terintegrasi. Menurut data primer yang peneliti lakukan, di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon, program Wadul Bae merupakan layanan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program Wadul Bae juga adalah suatu wadah kepedulian warga akan hak-hak anak yang ada di wilayahnya. Tujuan dari program Wadul Bae ini antara lain untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan di tingkat RT RW dan Kelurahan di Kota Cirebon, membantu menyelesaikan masalah, dan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cirebon.

Kota Cirebon sejak tahun 2018 sedang menjalankan program bergengsi yaitu *Smart City*, dalam pemberitaan nasional.republika.co.id pada 15 Juni 2017 proyeksi *Smart City* Kota Cirebon memberitakan terkait Surat Keputusan Kemenkominfo RI No: 265. KOMINFO/DJAI/AI.01.05/05/2017 pada tanggal 5 Mei 2017 tentang Penyampaian Hasil Seleksi *Assement* Gerakan Menuju *Smart City*. Pada surat tersebut, Kota Cirebon menjadi salah satu dari 25 Kota/Kabupaten yang lulus seleksi menjadi peserta Gerakan Menuju 100 *Smart City*. Uniknya, konsep program *Smart City* Kota Cirebon ini berbasis kearifan lokal Kota Cirebon, biarpun telah menjadi kota pintar, Kota Cirebon tidak ingin menghilangkan unsur kearifan lokal. Program Wadul Bae menjadi salah satu program unggulan di dalam program *Smart City* Kota Cirebon, Wadul Bae menjadi salah satu program utama yang di uji coba dalam program *Smart City* dari empat program utama lainnya yaitu, *Cirebon Lengko*, *Wadul Bae*, *Brojol Aja Klalen*, dan *Cirebon Melet*.

Wadul Bae merupakan program yang cukup menarik perhatian, pasalnya program Wadul Bae adalah program yang apada awalnya tidak diberikan anggaran oleh pemerintah. Kader-kader dari program ini adalah orang-orang yang tulus dan ikhlas mengabdikan kepada masyarakat. Khususnya dari program ini adalah dengan adanya program Wadul Bae, korban dan kasus ini dapat terkawal dari awal proses penyembuhan sampai pasca penyembuhan dan tidak ada batasan waktu tertentu. Ciri khas lain dari program Wadul Bae yang menjadi tolak ukur peneliti untuk meneliti program ini yaitu kekuatan jejaring sosial para kader untuk bisa terus memantau perkembangan kasus. Adapun fakta menarik data sekunder dari Radar Cirebon.com yang menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak (KSA) di Kota Cirebon tergolong tinggi dan mengkhawatirkan. Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Cirebon menunjukkan

bahwa kasus kekerasan korban yang mendominasi adalah anak-anak dibanding dewasa. Pada catatan lembaga pendamping korban, *Women Crisis Center* (WCC) Mawar Balqis dalam CNN Indonesia mendapatkan data terkait Kekerasan Seksual Pada Anak (KSA) di Kota Cirebon, bahwa pada empat bulan pertama tahun 2016 sudah berjumlah 30 kasus. Adapula data yang ditemukan pada tahun 2017 menurut Manajer Lembaga Aktivistis Perempuan *Women Crisis Center* (WCC) Mawar Balqis, pada tahun 2019 ada 88 laporan dari masyarakat terkait kasus kekerasan seksual pada anak dan pada tahun 2020 dari awal bulan Januari sampai Mei sudah ada 25 laporan yang masuk.

Data lain dari Masrokhah, Direktur *Women Crisis Center* (WCC) Mawar Balqis adalah, Murid SD dan SMP menempati posisi tertinggi sebagai korban kekerasan seksual di Wilayah III Cirebon. Sedikitnya 42 siswi SD dan 42 siswi SMP di Wilayah III Cirebon menjadi korban kekerasan seksual. Dari 140 kasus yang tercatat di *Women Crisis Center* (WCC) Mawar Balqis, diterima melalui WCC Mawar Balqis, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Cirebon, dan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) hingga November 2019, sebanyak 85 di antaranya adalah kekerasan seksual yang mana korbannya rata-rata siswi SD dan SMP (Baehaqi Imam Ahmad, *tribunnews.com* Rabu, diakses pada tanggal 12 September 2019). Data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh polisi resor kota Cirebon tahun 2020 sebanyak 39 kasus dan pada Tahun 2021 sebanyak 57 kasus (Data diperoleh dari satuan reserse kriminal oktober 2021). Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Cirebon dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon pada tahun 2020 total 54 kasus dan pada tahun 2021 46 kasus, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon tiap tahunnya tidak menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dilihat pada tahun 2016 ke tahun 2021, tahun dimana Kota Cirebon mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak, memang angka kekerasan seksual pada anak menurun, akan tetapi tidak menunjukkan penurunan yang cukup signifikan.

Anak adalah sebuah aset dan harapan di masa depan, bagaimanapun juga perlunya peranan aktif dan ada penanganan yang cukup dan melindungi untuk tindakan yang sudah marak beredar dari pihak pemerintah dan juga masyarakat, khususnya Kota Cirebon akan terus memantau dan memotivasi korban agar dapat beraktifitas normal, lalu pelayanan terpadu ini tidak ada keterbatasan waktu, hampir 24 jam selalu siap melayani korban dan kasus tanpa bayaran. Para kader Wadul Bae tidak hanya membantu seseorang yang telah menjadi korban, juga mengedukasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga Kota Cirebon. Pernyataan dari Pak Suryadi selaku Ketua dari Program Wadul Bae, mengatakan bahwa semua P2TP2A yang ada di Indonesia rata-rata lemah di jejaring, kurangnya pengurus untuk meneruskan program-program penanganan masalah masyarakat, P2TP2A Kota Cirebon termasuk yang aktif dan mempunyai banyak jejaring.

Penelitian ini berupaya untuk berfokus kepada strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam program “Wadul Bae” dalam menekan tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kota Cirebon, kemudian menemukenali serta menganalisis permasalahan terkait pemenuhan dasar hak anak yang telah dilakukan oleh instansi di wilayah kota Cirebon dalam mengimplementasikan program Kota Layak Anak. Adapun acuan permasalahannya didasarkan pada kluster hak dasar anak yang mengacu pada Permen PP & PA No 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak meliputi : 1). Hak Sipil dan Kebebasan, 2). Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3). Kesehatan dan Kesejahteraan anak 4). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, 5). Perlindungan khusus.

Sehingga harapannya, instansi yang terkait dapat menindaklanjuti program guna menyusun skala prioritas dan aturan terkait dengan hak anak, mengintegrasikan program dengan pengarusutamaan hak anak (PUHA) dimasa mendatang agar sinergisitas dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dapat terjadi.

Dari latar belakang tersebut, muncul pertanyaan penelitian, sebagai berikut; 1). Apa sajakah Program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah lan Emboke) ? 2). Bagaimana strategi program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan emboke) dalam menekan tingkat kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon?. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan dan manfaat penelitian in diharakan dapat; 1). Mengetahui Program apa saja yang diselenggarakan oleh Wadul Bae. (2). Memperoleh gambaran mengenai strategi program Wadul Bae dalam menekan tingkat kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon. Sedangkan kegunaan penelitian adalah: 1). Manfaat akademis penelitian ini adalah memberi sumbangan teoritis berupa tambahan khasanah keilmuan tentang pentingnya mengintegrasikan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi anak baik laki-laki maupun perempuan. 2). Manfaat praktis penelitian ini adalah agar menjadi bahan refleksi dan evaluasi serta penyusunan langkah strategis oleh pemerintah Kota Cirebon dalam melaksanakan serta mengembangkan Kebijakan Kota Cirebon, khususnya yang terkait strategi menekan tingkat kekerasan seksual pada anak. 3). Manfaat praktis lainnya adalah sebagai daya dorong bagi pihak lain untuk melakukan riset atau kajian-kajian terhadap anak khususnya yang terkait dengan pemenuhan hak partisipasi dan hak sipil anak.

Kerangka Teori

Dari sudut pandang sosiologis, anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas, potensi yang dimilikinya. Hal ini telah tertuang dalam UU No 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai perlindungan anak bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Anak adalah bagian terpenting dari sebuah negara dan merupakan investasi jangka panjang. Untuk itu, anak sebagai *human investmen* harus dilindungi dan dijaga. Gerakan perlindungan terhadap anak, sebetulnya sudah lama ada, yaitu pada zaman peradaban Islam, tepatnya ketika Rosulullah Muhammad SAW melarang Kaum Quraisy mengubur anak perempuan mereka. Kemudian, secara tekstual dalam Al Qur’an, QS. Ali Imran (3): 36, pun termuat adanya kesetaraan penghormatan dan usaha melindungi anak-anak dari segala bentuk intimidasi, penindasan atau memperlakukan anak semena-mena karena perbedaan jenis kelamin.

Namun, nyatanya banyak pihak yang belum memiliki pemahaman yang demikian. Bukti nyatanya adalah terjadinya kasus pembunuhan terhadap anak dan berbagai tindak kekerasan terhadap anak, seperti pelecehan seksual, pemaksaan menikah dini, pengiriman anak ke luar negeri, penjualan anak, mempekerjakan anak di bawah usia dan menjadikan anak terlantar di jalanan. Dan, pelaku berbagai tindak kejahatan tidak lain adalah keluarga sendiri. Membincang dan memahami kekerasan ibarat menguak tumpukan gunung es yang teramat sedikit di permukaan, namun begitu menumpuk di dasar gunung tersebut. Dengan kata lain, meski sudah banyak dipermasalahkan hingga dibuat undang-undang anti kekerasan, tetapi tetap saja tindak

kekerasan terjadi hampir di setiap lini kehidupan kita. Hj Mufidah dalam bukunya yang berjudul 'Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?', mencatat setiap tahun diperkirakan 3,3 juta anak telah mengalami kekerasan domestik. Mereka mengalami luka-luka, pelecehan psikologis dan fisik, terlantar, baik ketika anak menyaksikan ibunya dipukul atau bersama ibu menjadi bagian dari korban beruntun kekerasan domestik (Mufidah, 2006: iii). Lebih lanjut, Hj Mufidah, dkk (2006: 25) mengategorikan bentuk kekerasan dan dampaknya menjadi empat macam, yaitu;

1. Dampak fisik, seperti luka-luka, memar, lecet, gigi rompal, meninggal, patah tulang, cidera, gangguan fungsional keluhan fisik dan cacat permanen.
2. Dampak psikis: sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, gangguan makan, gangguan tidur, mudah lelah, tidak bersemangat, takut/ trauma, membenci setiap laki-laki, panik, mudah marah, resah dan gelisah, bingung, menyalahkan diri sendiri, malu, perasaan ingin bunuh diri, menarik diri dari pergaulan sosial, melampiaskan dendam pada orang lain termasuk anak, melakukan usaha bunuh diri, depresi ataupun menjadi gila.
3. Dampak seksual: kerusakan organ reproduksi, trauma hubungan seksual.
4. Dampak ekonomis: penelantaran.

Apapun bentuknya, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual pastilah mendatangkan ketidakadilan dan memunculkan kepedihan dan penderitaan bagi korbannya. Keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anggotanya khususnya anak. Oleh karena itu berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak. Meski demikian, telah banyak peraturan yang mengatur dan mengawasi anak dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, namun masih saja ditemukan permasalahan anak yang justru terlihat semakin kompleks. Di bidang pendidikan, angka putus sekolah mengalami trend kenaikan yang disebabkan oleh kemiskinan, di bidang kesehatan ditemukan masih banyaknya anak dari keluarga miskin yang belum dapat mengakses kesejahteraan, aksesibilitas anak difabel dalam memperoleh pendidikan. Hal ini mengindikasikan diskriminasi pada anak, serta maraknya kasus kekerasan pada anak yang disebabkan oleh orang-orang terdekat di sekitar anak seperti: orang tua, saudara, hingga guru dan teman sebaya. Selain keluarga, perlakuan lingkungan bermain, lingkungan tempat belajar, dan fasilitas publik yang disediakan pemerintah, seperti jalan, alat transportasi, tempat rekreasi, dan lainnya, ternyata juga belum juga ramah terhadap anak (Pudji Julianingsih, 2009: 4). Fakta tersebut menunjukkan kepada kita bahwa problem anak luar biasa banyaknya meskipun sudah ada regulasi yang melindunginya. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 misalnya, secara jelas mengatur tentang hak-hak anak, sebagaimana tertuang dalam pasal 28B ayat 2, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selain UUD 1945, ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT); Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang memuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kemudian, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

bersama sektor pemerintah terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat mengembangkan model Kota Layak Anak, yaitu kota yang di dalamnya telah meramu semangat untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kegiatan atau upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak anak (KLA). KLA dimaksudkan sebagai suatu upaya nyata untuk menyatukan isu hak anak ke dalam perencanaan dan pembangunan kabupaten/kota (Pedoman KLA, 2006). Guna mempercepat terwujudnya pengembangan Kota Layak Anak (KLA), KPPPA menjadikan model KLA ini sebagai prioritas program dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak dengan menetapkan 7 (tujuh) aspek penting dalam pengembangan KLA yaitu: 1) Kesehatan; 2) Pendidikan; 3) Sosial; 4) Hak Sipil dan Partisipasi; 5) Perlindungan Hukum; 6) Perlindungan Ketenagakerjaan; 7) Infrastruktur (Pedoman Kebijakan KLA, 2006).

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) *Mainstreaming Children Rights* merupakan konsep relevan yang telah ditetapkan oleh Kemenag PP sebagai strategi yang dipandang mampu untuk dapat memastikan bahwa pembentukan aturan perundang-undangan, berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang mampu diakomodir dengan mengedepankan hak yang ada pada anak (Wismayanti, 2012). Sehingga perlu untuk memegang prinsip pengembangan yang mengacu pada tindakan non diskriminatif pada anak, kepentingan terbaik bagi anak, Hak hidup, bertahan hidup dan berkembang. Dalam Permen PP & PA No 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa indikator Kota Layak Anak meliputi: penguatan kelembagaan serta pemenuhan kebutuhan berdasarkan kluster hak anak. Penguatan Kelembagaan didefinisikan sebagai upaya lembaga dalam mengintegrasikan hak anak kedalam rencana pembangunan wilayah dengan memberikan anggaran untuk pemenuhan hak anak, serta tersedianya sumber daya manusia yang dapat melaksanakan kegiatan, menyangkut pemenuhan hak anak, ketersediaan data pilah di tiap wilayah, keterlibatan lembaga lain dalam pemenuhan hak anak serta tinjauan mengenai keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. Sedangkan hal yang menyangkut hak pemenuhan kebutuhan anak meliputi 5 (lima) kluster sebagai berikut:

1. Hak Sipil dan Kebebasan yang meliputi:

- a. Keberadaan anak yang teregistrasi dan memiliki kutipan Akta Kelahiran
- b. Ketersediaan fasilitas informasi bagi anak
- c. Adanya Kelompok Anak maupun Forum Anak yang dibentuk di wilayah kecamatan

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yang meliputi:

- a. Kondisi usia perkawinan pertama di bawah usia 18 tahun
- b. Ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua dalam rangka pengasuhan dan perawatan anak
- c. Tersedianya lembaga kesejahteraan anak

3. Kesehatan dan Kesejahteraan anak yang meliputi:

- a. Angka Kematian Bayi
- b. Prevalensi Kekurangan gizi pada balita
- c. Presentasi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
- d. Keberadaan Pojok ASI
- e. Keberlangsungan imunisasi dasar lengkap
- f. Ketersedian lembaga yang memberikan layanan kesehatan reproduksi dan mental
- g. Anak dari keluarga miskin mendapatkan akses kesejahteraan

- h. Ketersediaan akses bersih pada rumah tangga
 - i. Ketersediaan kawasan tanpa rokok
- 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang meliputi:**
- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
 - b. Pelaksanaan kegiatan wajib belajar pendidikan selama 12 tahun
 - c. Keberadaan sekolah ramah anak
 - d. Ketersediaan sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana, program anak dari dan ke sekolah yang aman bagi anak
 - e. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah dan dapat diakses oleh semua anak
- 5. Perlindungan khusus**
- a. Presentasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan memperoleh layanan;
 - b. Presentasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif (*Restorative Justice*)
 - c. Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
 - d. Persentase anak yang dibebaskan dari pekerjaan terburuk.

C. Pembahasan dan Analisis

Pada bab ini peneliti akan membahas terkait penyajian data dan analisis data tentang penelitian ini, yaitu Strategi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Pada Program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Mboke) dalam Rangka Menekan Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak. Pada bagian sajian data ini, seperti yang telah dipaparkan dalam bab I penelitian ini menggunakan tiga jenis pengumpulan data yaitu, wawancara yang berfokus pada wawancara mendalam (*in-depth interview*), sajian pustaka, dan dokumentasi. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan bertumpu oleh *interview guide* yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, dengan harapan jawaban dan informasi dari wawancara akurat dan sesuai dengan pembahasan penelitian strategi pemasaran sosial ini. Sajian pustaka dan dokumentasi adalah hasil temuan data di lapangan pada saat penelitian berlangsung, dengan harapan dapat menjadi data penguat penelitian ini.

Pertanyaan wawancara mendalam dijawab oleh beberapa institusi dan lembaga terkait penelitian, Sedangkan dokumentasi didapatkan melalui sumber-sumber yang berkaitan dari media *online*, dokumen pribadi dari tempat penelitian dan sajian pustaka didapat dari data-data pribadi yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait, DSPPPA, P2TP2A, PPT RSUD Gunung Jati dan pihak-pihak kemitraan (Baznas, Rumah Zakat, Zakat Center) Kota Cirebon.

Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menekan tingkat kekerasan seksual pada anak tahun 2019 melalui Program Wadul Bae, yang mana dalam sajian pustaka ini akan dibagi ke beberapa klasifikasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang akan di paparkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Riset Selama Dua Tahun Untuk Perencanaan Program Wadul Bae

Terkait dengan strategi DSPPPA untuk menekan tingkat kekerasan seksual pada anak, yang mana hal tersebut didasari dengan kebijakan publik. Bahasa lain dari kebijakan publik itu sendiri dalam keputusan internasional disebut sebagai *public policy*, menurut pendapat pakar terkait kebijakan publik, Thomas (dalam Nugroho, 2003:3), bahwa kebijakan publik sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi permasalahan sosial di masyarakat sehingga mampu menjawab persoalan negara.

Maka dengan adanya implementasi hukum nasional, ekspektasi dari aturan pemerintah pusat maupun daerah sebenarnya wajib menyelenggarakan upaya-upaya terkait perlindungan bagi perempuan dan anak dari bahaya kekerasan dalam bentuk pelayanan terpadu. Namun, realita yang terjadi tidak semua daerah mempunyai kebijakan tersebut. Program Wadul Bae yang telah disepakati menjadi program pemerintah pada awal tahun 2010 dan masuk kedalam program unggulan P2TP2A Kota Cirebon menjadi kebijakan pemerintah untuk menggabungkan kerjasama antara masyarakat (Program Wadul Bae) dan Pemerintah Kota Cirebon (P2TP2 dan DSPPPA) menjadi pilihan yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial yang marak terjadi di Kota Cirebon khususnya terkait fenomena kekerasan. Menurut pendapat peneliti pilihan untuk memberikan kontribusi dalam menangani permasalahan sosial ini adalah pilihan yang tepat karena dengan adanya program layanan untuk masyarakat ini sama saja dengan memberikan perhatian lebih untuk kasus kekerasan pada perempuan dan anak, khususnya dalam melindungi anak yang rentan akan korban kekerasan seksual di Kota Cirebon, melihat setiap tahunnya Kota Cirebon selalu memiliki permasalahan sosial yang sama yaitu, jumlah kekerasan yang terus meningkat. Adanya kebijakan diadakan Wadul Bae seharusnya dapat membuka pemikiran masyarakat Kota Cirebon, bahwa tidak perlu takut untuk melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib dan mengedukasi masyarakat terkait tanda-tanda kekerasan. Namun kenyataannya masyarakat Kota Cirebon masih saja menganggap bahwa fenomena ini adalah hal yang masih sensitif untuk ditangani.

Sebelum memutuskan untuk membuat suatu program maupun kegiatan, agar program tersebut efektif dan tepat sasaran perlunya dilakukan analisis lingkungan dan situasi. Dalam menganalisis suatu lingkungan banyak cara yang dilakukan menggunakan beberapa instrumen analisis, seperti analisis pengamatan yang dilakukan Tim Wadul Bae menganalisis dengan caranya sendiri yaitu mengamati kondisi lingkungan dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Mereka hanya melihat pada kenyataan di lapangan saja selama dua tahun lamanya. Menurut peneliti pengamatan selama dua tahun harusnya dapat memberikan dampak yang maksimal, bisa mengetahui keinginan warga, bukan hanya keluhan warga. Namun, temuan data di lapangan melihat bahwa pengamatan selama dua tahun belum bisa memberikan dampak dari Program Wadul Bae secara maksimal, yaitu belum bisa mengetahui program kegiatan apa yang menjadi minat masyarakat Kota Cirebon dalam menangani masalah sosial seperti fenomena kekerasan dan dari hasil temuan lapangan terlihat bahwa kepengurusan yang membuat Program Wadul Bae belum memikirkan efek untuk kedepannya, yaitu seperti program akan berjalan dengan efektif atau tidak layak atau tidak pada proses pengamatan selama dua tahun.

2. Mengelompokkan Khalayak Sasaran Untuk Promosi Sosial Program Wadul Bae

Dalam memilih khalayak sasaran yang akan dijadikan target sasarannya, Tim Program Wadul Bae dengan tepat mengelompokkan kepada beberapa segmen, sesuai dengan teori spesifikasi kelompok kedalam beberapa segmen oleh Venus (2012) yang mengelompokkan seperti segmen geografis, segmen demografis, segmen psikografis, dan segmen behavioristik. Pada segmen geografis, dimana mengelompokkan khalayak yang menjadi target sasaran yaitu masyarakat Kota Cirebon. Tentunya hal tersebut menjadi pilihan yang tepat karena memang permasalahan yang harus ditangani secara khusus berada di Kota Cirebon, walaupun menurut hasil temuan lapangan, pada sajian data bahwa Wadul Bae pun tidak keberatan dalam melayani warga dari berbagai macam daerah di Indonesia, karena ingin mengusung konsep NKRI. Walaupun tidak banyak

korban dari daerah lain yang berkonsultasi kepada Wadul Bae. Hal ini juga menjadi pilihan yang mulia, walaupun tujuan dan fokus utamanya untuk masyarakat Kota Cirebon, ditengah kesibukan melayani masyarakatnya, pemerintah membiarkan masyarakat dari daerah lain untuk dilayani. Segmen demografis yang mengelompokkan *gender* dan usia Tim Wadul Bae menjadi pilihan yang tepat menurut peneliti, pasalnya dalam Program Wadul Bae yang mana hanya melayani perempuan dari semua usia dan anak-anak dari usia 0 bulan hingga 18 tahun. Memang fokus permasalahan yang banyak terjadi pada umur anak yang bervariasi, dan perempuan adalah korban paling dominan dibanding laki-laki.

Segmen psikografis yang dipilih oleh Wadul Bae dalam mengelompokan target sasarannya tidak memandang status ekonomi. Dalam mengelompokan target sasaran kegiatan dengan tidak memandang status ekonomi sudah tepat, karena permasalahan sosial yang terjadi, terlebih permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon itu tidak memandang status sosial, namun memang fokus utama Wadul Bae dengan memfokuskan kepada kelas sosial menengah kebawah dan keluarga yang mempunyai banyak anak. Hal tersebut menurut peneliti kurang tepat, karena permasalahan seperti ini tidak memandang status ekonomi ataupun kelas sosial. Banyaknya jumlah anak dalam sebuah keluarga menjadi alasan orangtua tidak memantaunya, itu pun tergantung dari didikan atau ajaran dalam keluarga masing-masing bukan melihat dari banyak atau sedikitnya anak, apalagi status ekonomi sekelompok masyarakat. Berkaitan dengan pembahasan ajaran dan didikan dari pihak keluarga, adapun segmen behavioristik yang menjadi pilihan Wadul Bae dengan melihat didikan dari keluarga, kebiasaan anak seperti bermain *gadget* dan memilih lingkungan bermain menjadi pilihan yang tepat menurut peneliti, karena anak adalah cerminan didikan dan pantauan dari keluarganya, keluarga tidak bisa terlalu membiarkan anak bebas, namun tidak bisa juga terlalu mengekang keinginan anak. Dengan memilih segmen behavioristik yang seperti itu dapat membuat topik yang tepat dalam mengedukasi Warga dan Keluarga di Kota Cirebon.

3. Membuat Tim Kader Wadul Bae

Dalam pernyataan Bessette menjelaskan bahwa partisipasi dapat dilihat dari keterlibatan aktif para komunitas dalam berbagai kelompok, bersama dengan *stakeholder* yang terlibat, para kader atau agen sosial, dan pengambil kebijakan. Bessette (2004:1) menyatakan "*community participation mean facilitating the active involvement of different community group, together with the other stakeholder involved, and the many development and research agent working with the community and decision makers*" Hal tersebut terlihat bahwa adanya partisipasi yang baik dari para kader yang sampai dengan saat ini sudah berjumlah 70 orang, juga dukungan dari Pemerintah Kota Cirebon dalam menyikapi kasus kekerasan pada perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual pada anak. Hal tersebut dikarenakan pada temuan lapangan yang mana dari semua kasus kekerasan, sebanyak 85% nya adalah kekerasan seksual pada anak marak terjadi di Kota Cirebon. Adapun pembentukan kelompok dalam Program Wadul Bae terlihat sesuai dengan klasifikasi kelompok menurut Rumondor dalam Ruslan (2003) yang mana, ada tiga klasifikasi kelompok yaitu kelompok memberi bantuan, kelompok pendukung, dan kelompok evaluasi. Pemilihan kelompok yang cukup tepat sehingga fasilitas dalam Program Wadul Bae pun cukup lengkap, mulai dari pemerintahan, kesehatan, hingga lembaga hukum dan tim verifikasi kegiatan. Namun, untuk kegiatan pelatihan bagi para Kader Wadul Bae, menurut peneliti perlu dievaluasi seperti, adanya pelatihan yang mendalam dan rutin pasalnya pelatihan untuk para Kader Wadul Bae berefek dalam mempersuasi masyarakat Kota Cirebon. Jika melihat temuan lapangan, pelatihan untuk para kader

dilakukan belum maksimal, dan belum bisa memberikan efek besar atau merata dalam mempersuasi masyarakat Kota Cirebon. Sangat disayangkan melihat sangat terbantunya dengan adanya fasilitas seperti Kader Wadul Bae harus dimanfaatkan dengan maksimal.

4. Mengimplementasikan Strategi Sosialisasi

Untuk melakukan strategi sosialisasi, perlu dibentuk konsep untuk menentukan program, Nilai atau suatu manfaat, menentukan tempat, mempromosikan, menjalin kemitraan dan harus adanya kebijakan. Dalam strategi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Wadul Bae, jika dilihat hubungan Wadul Bae dengan pihak kemitraan terlihat bahwa kurangnya koordinasi antara pihak kemitraan dan pihak kepengurusan Wadul Bae. Untuk mengimplementasikan kebijakan pada *policy* seperti tidak ada koordinasi antara pihak pemerintah, melalui DSPPPA dan kepengurusan Wadul Bae.

Konsep perencanaan Program Wadul Bae memang selaras dengan pelaksanaan strategi pemasaran sosial Wadul Bae, adapun pihak-pihak lain yang menjalin kemitraan bersama dengan DSPPPA dan program Wadul Bae, yang mana lembaga-lembaga ini adalah lembaga sosial yang berkonsentrasi kepada pemberdayaan masyarakat, ada tiga lembaga yang terkait yaitu Baznas, Rumah Zakat, dan Zakat Center. Saat pada penemuan lapangan saat peneliti konfirmasi pada wawancara mendalam dengan masing-masing lembaga pihak kemitraan, tiap lembaga merasa tidak mengenali dan sedikit asing dengan Program Wadul Bae, lembaga-lembaga tersebut mengakui bahwa adanya kerjasama dengan pihak DSPPPA terkait permasalahan sosial di Kota Cirebon, namun untuk bekerjasama dengan Program Wadul Bae pihak lembaga tersebut tidak mengetahuinya. Menariknya, dalam sajian pustaka data pribadi milik P2TP2A dalam Program Wadul Bae, pihak Wadul Bae mencantumkan nama-nama lembaga terkait pelaksanaan kemitraan tersebut. Data dari sajian data hasil wawancara bersama pihak Wadul Bae terkait mengkonfirmasi terkait ketidaktahuan para lembaga kemitraan, Wadul Bae mengaku telah mengkomunikasikannya secara pribadi dengan pihak kelembagaan terkait, hanya saja mengkomunikasikannya kepada kepengurusan yang lama.

Berbeda dengan pengertian kemitraan sebenarnya, yaitu menjalin hubungan kerjasama dan dituntut untuk selalu berkomunikasi. Dalam mengimplementasikan *partnership* dan *policy* tim Wadul Bae masih kurang adanya koordinasi dan komunikasi, melihat dalam penjelasan Robert (2009:101) bahwa dalam pemasaran sosial harus mengacu pada makna penting kerjasama dengan organisasi lain untuk menangani masalah yang begitu rumit sehingga tidak sendirian dalam menangani masalah. Namun kenyataannya program Wadul Bae masih kurang dalam mengkoordinasikan kegiatan bersama para pihak kemitraannya. Dalam hal ini, menurut pendapat peneliti, Pihak Wadul Bae kurang mengkoordinasi dengan pihak kemitraannya. Melihat pengertian *partnership* atau kemitraan menurut Robert (2009:101) dalam pemasaran sosial yang mana kerjasama dengan pihak kemitraan seperti organisasi lain untuk menangani masalah yang begitu rumit seperti permasalahan sosial itu sangat penting agar sehingga tidak sendirian dalam menangani masalah. Mungkin perlu dilakukan rapat rutin bersama pihak lembaga kemitraan tersebut. Ditambah program dan kegiatan-kegiatan Wadul Bae yang belum dikenal secara menyeluruh, kurangnya sosialisasi yang menyeluruh dan kurang konsisten dalam membuat konsep komunikasi sehingga membuat Program Wadul Bae itu sendiri kurang dikenal oleh pihak kemitraannya sendiri. Sebaiknya Tim Wadul Bae harus lebih erat lagi dalam menjalin hubungan bersama pihak kemitraan, bagaimanapun juga komunikasi harus tetap berjalan karena adanya hubungan saling membantu dan bekerjasama. Lalu untuk kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah dan hukum yang ada, dengan adanya Program Wadul Bae seharusnya diberikannya anggaran khusus penanganan kekerasan

dan mengatasi kekerasan pada anak. Melihat anggaran yang diberikan adalah hanya potongan anggaran 20% dari anggaran pendidikan, menurut peneliti kurang adanya keadilan dalam memberikan anggaran.

5. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Wadul Bae

Program-program sosialisasi dalam kegiatan Wadul Bae menurut sajian data menarik perhatian penulis. Pasalnya, dalam melaksanakan strategi pemasaran sosial Wadul Bae tidaklah mudah, karena banyaknya Warga Kota Cirebon yang acuh tak acuh kepada fenomena kekerasan membuat Tim Wadul Bae berusaha keras dari sulitnya membuat waga yang menjadi “melek” terhadap fenomena kekerasan. Lalu, pada sajian data terlihat bahwa Tim Wadul Bae berinovasi membuat suatu taktik yang unik dan menarik menurut pandangan peneliti, sehingga muncul inovasi, taktik dengan cara yang unik yaitu menggandeng beberapa kemitraan, dan bergabung dengan beberapa program sosialisasi lain yang sebenarnya topik dalam sosialisasi gabungan tersebut terkadang sesuai dengan topik sosialisasi Wadul Bae, namun terkadang tidak sesuai. Ini adalah salah satu taktik yang unik dan inovasi baru untuk mengakali agar dapat terus mengedukasi Warga Kota Cirebon dengan harapan warga sadar dengan indikasi-indikasi kekerasan dan berani melapor kasus-kasus kekerasan disekitarnya. Nama “Wadul Bae” dalam program pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak ini berasal dari bahasa daerah Cirebon. Namun sangat disayangkan dalam programnya sendiri tidak ada unsur kegiatan khusus atau kegiatan tradisional khas Kota Cirebon. Wadul Bae hanya memberi nama program dengan mengusung kearifan lokal, namun tidak memasukan unsur lokal maupun nilai-nilai lokal kedalam program-program, seperti kegiatan tari jaipong, kegiatan membatik, atau kesenian-kesenian lain yang dapat menarik perhatian masyarakat Kota Cirebon, mungkin selain dapat menarik perhatian juga bisa melestarikan kegiatan lokal khas Kota Cirebon. Misalnya pada program *Three Ends*, memang nama kegiatan tersebut diberikan dan di setuju oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia, dengan menamai kegiatan menggunakan bahasa asing. Namun menurut peneliti nama kegiatan tersebut sangat tidak sesuai dengan nama program Wadul Bae, karena Wadul Bae menamai dirinya dengan berbasis bahasa daerah Cirebon, seharusnya bisa diberikan nama sampingan atau nama tambahan disamping nama kegiatan *Three Ends* yang mana nama sampingan itu berbahasa daerah Kota Cirebon, agar masyarakat Kota Cirebon paham pada saat pertama kali mendengar kegiatan tersebut.

Kegiatan *Three Ends* itu kegiatan sosialisasi kepada anak-anak menggunakan lirik-lirik lagu atau *jingle* lagu. Namun lirik dari lagu atau *jingle* yang dipakai oleh Wadul Bae menggunakan bahasa Indonesia. Menurut peneliti, memang program telah diberikan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan bahasa asing, namun pemerintah pusat mempersilahkan agar *jingle* atau lagu tersebut di ciptaan oleh masing-masing daerahnya, disini menurut peneliti lebih baik Wadul Bae menciptakan *jingle* kegiatan *Three Ends* Kota Cirebon menggunakan bahasa Cirebon, selain menarik perhatian masyarakat Kota Cirebon juga bisa menjadi hal yang beda dan unik, berbeda dari daerah lain di Indonesia, dan tentunya bisa menjadi nilai tambahan untuk Wadul Bae mewakili Kota Cirebon. Dalam ketidak konsisten kegiatan dan nama program, menurut peneliti seperti tidak ada komunikasi dan koordinasi yang baik antar bidang di DSPPPA dan kepengurusan Wadul Bae. Pasalnya, nama program yang jelas mengusung kearifan lokal saja jelas tidak sesuai dengan nama kegiatan yang berasal dari bahasa asing. Lalu berbicara mengenai kegiatan, arsip data menjadi suatu hal yang penting untuk semua instansi, organisasi, dan lembaga sekalipun. Menyimpan sebuah arsip seharusnya menjadi sebuah kewajiban, untuk menyimpan data atau kegiatan yang

mana untuk memudahkan para instansi bila membutuhkan data tersebut dikemudian hari. Namun sangat disayangkan bahwa Tim Wadul Bae, baik dari DSPPPA, P2TP2A dan PPT tidak membuat arsip khusus dokumentasi kegiatan program, terlihat dari penjelasan di sajian data. Dokumentasi di Wadul Bae masih sangat lemah, tidak semua kegiatan terdokumentasi secara rapih dan merata. Sebaiknya untuk kebaikan program Wadul Bae kedepan, tidak hanya berfokus kepada pelayanan saja, namun juga harus tetap fokus pada dokumentasi atau mengarsipkan data setiap bulannya, dan setiap kegiatan menjadi suatu hal yang wajib dilakukan. Menjalin hubungan dengan media adalah menjadi salah satu hal penting lainnya yang harus tetap diperhatikan dalam membuat strategi pemasaran sosial, jika dilihat pada sajian data Wadul Bae memang mempunyai hubungan yang baik dan selalu terhubung dalam kegiatan bersama pihak media. Seperti kegiatan bersama televisi lokal Kota Cirebon sampai dengan Radio Nasional Indonesia. Pada informasi dalam sajian data terlihat bahwa Wadul Bae tidak jarang selalu diberi kesempatan untuk menjadi narasumber dalam sebuah program. Menurut pendapat peneliti, topik yang menjadi pembahasan juga berbobot dan mempunyai nilai. Selain itu topik yang dibahas selalu mengaitkan isu kekerasan dengan fenomena yang sedang terjadi pada masanya, kontennya pun cukup menarik, kritis dan mengedukasi.

Setelah membahas kegiatan sosialisasi program Wadul Bae baik kegiatan sosialisasi secara langsung bersama warga maupun dengan media, untuk sampai kepada tahapan penanganan pastinya disosialisasikan terlebih dahulu terkait alur penanganan dari hulu maupun ke hilir, baik di Wadul Bae maupun PPT RSUD Gunung Jati, baik dalam bentuk infografis maupun brosur. Menurut pandangan peneliti, dalam infografis alur layanan yang terdapat pada sajian data secara umum masih kurang dipahami jika melihat kepada masyarakat secara umum. Tidak semua orang paham dalam sekali melihat alur yang cukup panjang dan bercabang seperti itu, baik alur pelayanan Wadul Bae maupun PPT. Harus ada inovasi infografis baru yang lebih sederhana berserta penjelasan singkat mengenai alur pelayanan tersebut, melihat bahwa Warga Kota Cirebon acuh tak acuh dalam isu kekerasan, harus adanya gerakan untuk membuat sesuatu yang menarik perhatian dalam sekali melihat alur pelayanan tersebut.

6. Kegiatan Evaluasi Pada Program Wadul Bae

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan kegiatan pelaksanaan pemasaran sosial dalam suatu kampanye *Public Relations*, menurut Kotler & Roberto (1989:17-18) ada beberapa elemen yang menjadi tolak ukurnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Sasaran sosial yaitu para Warga Kota Cirebon yang dipercaya oleh DSPPPA dan pengurus program Wadul Bae dapat memberikan jawaban terhadap suatu masalah sosial atau kehidupan masyarakat, dengan adanya para kader-kader Wadul Bae ditiap RT dan RW. Pemilihan yang tepat dalam membuat kader-kader Wadul Bae ditiap RT dan RW daerah Kota Cirebon. Para kader dapat selalu memantau kejadian-kejadian ditiap daerahnya masing-masing, yang mana hal tersebut menjadi hal yang baik untuk perkembangan Program Wadul Bae.
- b. Para pengurus Wadul Bae sebagai agen perubahan mengadakan kegiatan berupa sosialisasi dan penyuluhan kepada kader-kader Program Wadul Bae, dengan tujuan untuk menekan tingkat kekerasan di Kota Cirebon, terutama kekerasan seksual pada anak. Niat dan ketulusan hati para warga yang ingin membantu

- warga lain dalam menangani kasus kekerasan, dan melindungi warga dengan mengedukasi menjadi pilihan yang sangat mulia.
- c. Kelompok sasaran Wadul Bae dalam menargetkan sasarannya jelas sesuai dengan pengelompokan segmen. Pemilihan segmen beberapa diantaranya sudah cukup baik, dan sesuai dengan target sasaran.
 - d. Saluran komunikasi yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada kelompok sasaran Program Wadul Bae dilakukan dengan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Pemilihan saluran komunikasi dalam mensosialisasikan kegiatan Wadul Bae dan mengedukasi sudah sangat baik. Pasalnya, hampir semua media pendekatan dipakai oleh Program Wadul Bae.
 - e. Strategi perubahan, dalam Program Wadul Bae ada beberapa strategi pemasaran yang dilakukan untuk mengubah perilaku sosial masyarakat yang terlihat cukup signifikan yaitu program *Three Ends* dan program Maghrib Mengaji. Strategi tersebut memang tidak mudah untuk dilakukan, namun kegigihan Tim Wadul Bae dalam mengubah perilaku sosial warga Kota Cirebon dengan inovasi-inovasi kegiatannya menjadi hal yang sangat positif untuk terus dilakukan.

Dalam pelaksanaan pemasaran sosial Program Wadul Bae adanya kegiatan evaluasi rutin, yang mana kegiatan tersebut dilakukan yaitu sebulan satu kali untuk kepengurusan dan tiga bulan satu kali untuk para kader dan DSPPA. Dalam hal tersebut, menurut pendapat peneliti waktu yang diatur tersebut sudah cukup jika dilakukan rutin. Namun konten dalam kegiatan evaluasi masih kurang karena, dalam data evaluasi pada sajian data menyatakan bahwa Tim Wadul Bae tidak membuat arsip terkait data kuantitatif perkembangan kekerasan yang berhasil ditangani sampai dengan selesai, ataupun kegagalan penanganan. Bahkan data sederhana seperti data kuantitatif terkait kunjungan pasien maupun keberhasilan program sosialisasi tidak ada. Memang kunjungan pasien ada datanya secara keseluruhan kurang waktu lima tahun terakhir, namun yang merekap data tersebut adalah PPT RSUD Gunung Jati, datanya pun hanya sebatas pengelompokan pasien saja, tidak dispesifikasikan pasien dan korban kekerasan seksual anak berapa banyak dan korban dewasa berapa banyaknya. Untuk kedepannya, menurut peneliti Program Wadul Bae harus memiliki arsip terkait program-program dan pelayanan dalam Wadul Bae, seperti dokumentasi kegiatan, data rekapan kuantitatif perbulan maupun pertahun. Data tersebut pasti akan menjadi hal yang penting di hari yang akan datang.

Kurangnya warga yang berani untuk melapor, dan ketidaktahuan lembaga kemitraannya sendiri terkait Program Wadul Bae, dapat disimpulkan bahwa Program yang sudah berjalan kurang lebih 13 tahun lamanya ini kurang mensosialisasikan secara merata keseluruh pada tiap daerah di Kota Cirebon, ditambah dengan kurangnya inovasi baru dalam mensosialisasikan Program Wadul Bae. Mungkin dari tindakan warga yang kurang sadar terkait fenomena kekerasan, karena Wadul Bae kurang melakukan riset, seperti melakukan FGD dengan warga-warga Kota Cirebon atau perwakilan dari tokoh masyarakat terkait pelayanan apa yang ingin dilakukan, sosialisasi apa yang menarik dilakukan, hal apa yang membuat warga kurang terbuka terkait fenomena kekerasan dan hal apa yang menjadi acuan warga agar peduli.

Riset kecil-kecil yang dilakukan bisa membuahkan dampak yang besar yang dapat mengubah perilaku warga, yang mungkin dari tidak peduli jadi peduli, tidak berani melapor jadi berani, dan mungkin saja dari yang acuh tak acuh menjadi ingin bergabung keanggotaan Kader Wadul Bae. Keterbukaan lembaga untuk selalu mendengarkan pendapat dari warga menjadi hal terpenting dalam kesuksesan sebuah

instansi maupun lembaga. Apalagi permasalahan yang ditangani adalah masalah sosial dari warga untuk warga sendiri. Banyak hal positif dari keterbukaan bersama warga, salah satunya warga dapat lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan.

Setelah menyimpulkan terkait strategi sosialisasi Wadul Bae dalam menyikapi sikap Warga Kota Cirebon yang enggan untuk melapor, berikut adalah beberapa kritik dari peneliti yang telah menganalisis permasalahan penelitian ini secara serius, yaitu sebagai berikut; *Pertama*, Peran pemerintah dalam mendukung keberlangsungan program Wadul Bae untuk menekan tingkat kekerasan sudah baik, namun alangkah lebih baik jika Program Wadul Bae diberikan perhatian lebih khusus, seperti memberi anggaran khusus, agar sosialisasinya dapat dilakukan lebih efektif lagi dan merata. *Kedua*, Perlu adanya evaluasi dalam melatih dan memberikan penyuluhan para Kader Wadul Bae karena belum ada perubahan yang cukup terlihat dari tahun ke tahun. Cara para kader untuk mempersuasi warga masih kurang terlihat, para kader dibutuhkan pelatihan lebih banyak lagi. *Ketiga*, Perlu adanya inovasi baru untuk mengsosialisasikan kegiatan Wadul Bae, karena dilihat dari permasalahan yang ada, Wadul Bae masih kurang dalam mensosialisasikan secara meluas dan merata pada tiap-tiap daerah di Kota Cirebon. Perlu adanya inovasi kegiatan agar dapat menarik perhatian para warga Kota Cirebon, dari yang acuh menjadi penasaran, dari ingin tahu menjadi mencoba, dan mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. *Keempat*, Inovasi yang menarik bisa disesuaikan dengan nama program Wadul Bae itu sendiri, Wadul Bae yang diambil dari bahasa daerah Kota Cirebon sebaiknya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan lokal, budaya Kota Cirebon. Seperti tari jaipong, membatik, dan banyak hal lain dari kegiatan tradisional Kota Cirebon yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat Kota Cirebon. *Kelima*, Misalnya, dalam mengembangkan program *Three Ends* yang mana mengedukasi anak-anak Kota Cirebon menggunakan lagu atau jingle, judul dari nama kegiatan tersebut harus sesuai kan konsisten dengan nama Wadul Bae, mungkin bisa disamping nama kegiatan *Three Ends* (yang mana nama ini adalah nama yang diberikan oleh pemerintah pusat) dapat diselingi dengan bahasa daerah Kota Cirebon. Lalu, penulis rasa akan lebih baik jika lirik-lirik dari lagu atau *jingle* tersebut berbahasa lokal Kota Cirebon, selain dapat lebih mempengaruhi masyarakat Kota Cirebon, juga sesuai dengan Program Wadul Bae. Agar program Wadul Bae tidak hanya nama saja yang mengusung kearifan lokal, namun kegiatannya pun mengusung kearifan lokal. Nilai tambahnya adalah, lagu atau *jingle* yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia ini (*Three Ends*) akan unik dan berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Keenam, Program Maghrib Mengaji sangatlah bagus, melihat efek dari program tersebut membuahkan sebuah hasil yang baik. Lebih baik dikembangkan ke daerah-daerah lain di Kota Cirebon. *Ketujuh*, Perlu ada hubungan silaturahmi yang kuat dengan pihak kemitraan, agar tidak adanya kesalahan informasi dan komunikasi antara satu dan lain. Perlu juga untuk melaksanakan rapat koordinasi secara rutin bersama pihak kemitraan, karena sejauh ini hanya melakukan rapat bersama ruang lingkup internal, menurut peneliti perlu juga melakukan rapat koordinasi sekedar bertukar pikiran bersama pihak eksternal. Efeknya selain dapat dikenal oleh pihak kemitraannya sendiri, pihak lain merasa di hargai dalam melakukan program kerjasama. *Kedelapan*, Selain silaturahmi dengan pihak kemitraan, Wadul Bae juga harus sering bersilaturahmi bersama para masyarakat Kota Cirebon, seperti melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) bersama bagian dari masyarakat Kota Cirebon atau para tokoh masyarakat. Agar mengetahui apa yang sebenarnya menjadi keluhan warga, keinginan warga, untuk program yang lebih efektif lagi kedepannya. Jika dilihat dari harapan Ketua Wadul Bae sendiri yaitu ingin warga sadar dan berani untuk melapor. Perlu beberapa pendekatan dengan warga, dan mendengarkan keluh kesah warga. *Kesembilan*,

Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak internal, seperti pihak kepengurusan Wadul Bae dan pihak pemerintah yaitu DSPPPA Kota Cirebon. Komunikasi adalah kunci utama kelancaran sebuah program agar tidak adanya *miss communication* antar pihak, baik internal maupun eksternal. Dan *Kesepuluh*, Wadul Bae perlu mengevaluasi cara mengarsipkan sebuah data, baik data secara angka (kuantitatif) maupun dokumentasi, misalnya untuk data grafis antara kasus satu dan lainnya sebaiknya dibedakan warna grafisnya, agar terlihat rapih dan jelas untuk dibaca. Tujuan dari data arsip agar mempunyai data simpanan untuk dikemudian hari, sebaiknya harus segera evaluasi terkait pembuatan data arsip, karena setiap institusi ataupun lembaga sekalipun normalnya mempunyai arsip data khusus perbulan ataupun pertahunnya.

D. Kesimpulan

Dalam menyikapi fenomena kekerasan yang terjadi di Kota Cirebon, yang mana sebanyak 85% dari kasus kekerasan didominasi oleh kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal menyikapi sikap masyarakat yang acuh tak acuh dan enggan untuk melapor, Pemerintah Daerah Kota Cirebon akhirnya membuat suatu kebijakan dengan membuat wadah pelayanan permasalahan sosial, permasalahan kekerasan pada perempuan dan Anak di Kota Cirebon yaitu dengan menggandeng P2TP2A dalam Programnya Wadul Bae. Namun pada perencanaan kegiatan Wadul Bae tidak dilakukan secara struktural seperti instrumen analisis paling sederhana yaitu analisis SWOT. Keunggulan dari Wadul Bae, Timnya mengetahui betul apa saja yang akan ada di perencanaan dalam promosi dan sosialisasi. Wadul Bae adalah program pelayanan masyarakat yang berfokus pada pemberian hak-hak atas anak dan memperdayakan perempuan di Kota Cirebon. Nama dari “Wadul Bae” tercipta dari bahasa daerah Kota Cirebon sendiri, yang artinya laporkan saja, selain itu Wadul Bae adalah sebuah singkatan dari kalimat Warga Peduli Bocah Lan Mboke, yang arti dalam Bahasa Indonesia adalah Warga Peduli Anak dan Ibunya. Dalam membuat strategi pemasaran sosial Wadul Bae menggandeng beberapa masyarakat di tiap tiap RT dan RW di Kota Cirebon, juga pihak PPT RSUD Gunung Jati, Polresta Cirebon, Sekolah-sekolah, Puskesmas, dan beberapa lembaga seperti Rumah Zakat, Zakat Center, dan Baznas Kota Cirebon untuk bekerja sama dalam mengurangi permasalahan kekerasan baik pada perempuan dan anak di Kota Cirebon.

Selain fasilitas pelayanan untuk para korban-korban kekerasan, Wadul Bae membuat sosialisasi pencegahan dengan kegiatan sosialisasi, penyuluhan yang bertujuan mengedukasi Warga Kota Cirebon terkait indikasi-indikasi kekerasan, cara pencegahan, dan memotivasi untuk berani melapor tindakan. Namun, warga Kota Cirebon yang terlalu kaku dengan fenomena kekerasan ini selalu enggan untuk diajak dalam kegiatan sosialisasi. Akhirnya, Wadul Bae mempunyai sebuah strategi yang cukup menarik yaitu dengan bergabung kedalam kegiatan-kegiatan sosialisasi lain, yang kadang-kadang topik pembahasannya tidak sama dengan topik pembahasan Wadul Bae. Pada kegiatan gabungan tersebut Wadul Bae bekerjasama dengan beberapa pihak seperti puskesmas. Uniknyanya disini juga Wadul Bae bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti, Rumah Zakat, Zakat Center, dan Baznas Kota Cirebon, namun pihak kemitraan tersebut justru tidak mengetahui apa itu Wadul Bae.

Selain itu Wadul Bae juga memegang peranan penting dalam beberapa program pemerintah, yaitu Program *Three (3) Ends* untuk kampanye kekerasan pada anak dengan menggunakan lagu atau *jingle* yang mana liriknya berbahasa Indonesia yang menceritakan dan mengedukasi terkait kekerasan seksual pada anak, dan Program Maghrib Mengaji yang hanya dilakukan di RT 10 Kecapi Kota Cirebon. Sosialisasi yang dilakukan secara

tidak langsung berhubungan dengan media, yang mana Wadul Bae bekerjasama dengan pihak media baik cetak maupun elektronik dalam mensosialisasikan isu-isu kekerasan. Media yang sudah diajak bekerjasama pada tahun 2017 yaitu televisi lokal Cirebon dan juga radio nasional. Selain peran dari pemerintah dan masyarakat, pengawasan dan peran orangtua dalam mendidik anak adalah kunci utama untuk mengurangi tindakan kekerasan seksual pada anak, terutama yang mana pelakunya sekarang banyak terjadi adalah anak-anak itu sendiri. Orangtua harus lebih sadar terhadap apa yang anak lihat dan pergaulan seperti apa yang ada di lingkungan anak-anak.

Dengan semua kegiatan yang cukup menarik tersebut, selalu dilakukan evaluasi kepengurusan setiap satu bulan sekali dan bersama DSPPPA juga para Kader Wadul Bae selama tiga bulan satu kali untuk diadakan evaluasi dan pelatihan penanganan korban. Namun Wadul Bae tidak mempunyai cukup arsip untuk di evaluasi, seperti arsip dokumentasi kegiatan dan data kuantitatif permasalahan. Tim Wadul Bae juga tidak memberikan ruang untuk masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya terkait perkembangan pemasaran sosial program Wadul Bae untuk menangani permasalahan kekerasan yang ada di masyarakat Kota Cirebon.

Dapat disimpulkan bahwa Wadul Bae hanyalah sekedar nama berbasis kearifan lokal saja, namun program-program atau kegiatan di dalamnya tidak melibatkan unsur lokal sama sekali, seperti kegiatan *Three Ends* yang menggunakan nama dari bahasa asing yang mana tidak sesuai dengannama Wadul Bae yang diambil dari bahasa daerah Cirebon, begitupun dengan program lainnya hanyalah program seperti kegiatan pada umumnya, tidak ada aspek kultural sesuai dengan nama program tersebut yang menggunakan bahasa lokal. Selain kurangnya dokumentasi kegiatan, Wadul Bae juga kurang menjalin hubungan dekat dengan pihak kemitraannya, mungkin itu adalah faktor dari kurang meluas dan meratanya kegiatan pemasaran sosial Wadul Bae kepada masyarakat Kota Cirebon.

F. Daftar Pustaka

- Andreasen R. Alan. 2002. Marketing Social Marketing in the Social Change Marketplace, dalam *Journal Public Policy and Marketing*, Volume 2, No 1 Tahun 2002. United States : EBSCO. Halaman 1-12
- Anissa Sari E. 2017. *Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Terkait Pencegahan Narkotika Di Kalangan Remaja*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
<https://doi.org/10.37631/populika.v7i2.376>
- Asyari Yusuf. 2017, Maret 11. Dinas Pendidikan Galakan Program Maghrib Mengaji. Diakses dari <https://www.jawapos.com/> pada tanggal 14 Maret 2018
- Baehaqi Imam Ahmad. 2017, Desember 20. *85 Siswa SD dan SMP di Cirebon Raya Jadi Korban Kekerasan Seksual*. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/regional> pada tanggal 4 Januari 2018.
- Bensley R dan Fisher J. 2009. *Metode Pendidikan Kesehatan Masyarakat* Edisi 2. Jakarta: EGC
- Bessette, Guy. 2004. *Involving the Community : A Guide to Participatory Development Communication*. Penang, Malaysia : Southbound and International Development Research Centre. <https://doi.org/10.30541/v43i2pp.201-203>
- Cahyono Sofyan. 2017, Desember, 27. 126 Daerah Raih Penghargaan Kota Layak Anak. diakses dari www.jawapos.com, pada tanggal 15 Maret 2018
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia

- David R. Fredd. 2011. *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep Buku 1, Edisi 12*. Jakarta : Salemba Empat
- Denzin K.N dan Lincoln S. Y. 2011. *The Sage Handbook of Qualitative Research (Edisi Ketiga) [The Sage Handbook of Qualitative Research (Third Edition)]*, Cetakan I. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
<https://doi.org/10.1177/14687941090090030803>
- Djangkung, Vivick J. 2010. Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial Kampung Bebas Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (Studi Kasus : Pemberdayaan Masyarakat di Komplek Permata Kampung Ambon Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat), dalam *Jurnal Komunikasi dan Realitas Sosial*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010. Jakarta : Neliti.com. <https://doi.org/10.31602/jm.v3i2.3686>
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, teori dan filsafat komunikasi*. Bandung : Citra Aditya Bakt

